

# ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM PENAGIHAN PIUTANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA MINIMALISASI JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT X PERIODE 2014-2016

Dinda Alifa Rizki Aprilia<sup>1</sup>

Safrida Rumondang<sup>2</sup>

Sri Handayani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Agung Podomoro

<sup>3</sup>sri.handayani@podomorouniversity.ac.id

## Abstract

*The goals of this research are to evaluate and analyze the impact, in this case, the effectiveness level of the implementation of internal control over the billing system of PT X and its impact on the minimization effort of the bad debt expenses owned by PT X during the period of 2014 to 2016. This research is the kind of descriptive qualitative research and using evaluative approach. Some findings from this research are as follows: (1) PT X has literally applied the internal control system, specifically over its billing system; the implementations can be manifested through the making of the aging schedule summary, the implementation of data restriction toward the data related to receivables, and the creation of Standard Operating Procedure (SOP) related to its billing activities; (2) There is a fluctuation or inconsistent change on the A/R ratio on given period as one of the main indicators; it indicates that the implementation is not effective enough; (3) some factors that cause the bad debt expenses at PT X are PT.X's inability to do creditworthiness analysis and the grace period policy that is easily given without restrictions as well as the tenants who fail to disclose the change in phone numbers or addresses to PT X so PT X has a hard time to collect the payment from them; and (4) PT X has not written of its bad debt expenses and it is unmatched with what is assigned on PSAK (Indonesian Accounting Standards adopted from IFRS) 55 that requires to write off the bad debt expenses. However, there are some limitations on this research such as the research period, indicators, and unconsidered factors such as the current state of economy and technology developments.*

Keywords: *Internal Control, Bad Debt Expenses, Accounts Receivable Ratio, Creditworthiness Analysis*

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis dampak, dalam hal ini, tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal terhadap sistem penagihan PT X dan dampaknya terhadap upaya minimalisasi biaya piutang tak tertagih yang dimiliki oleh PT X selama periode 2014 hingga 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan evaluatif.



This is an open access article under the CC-BY-SA License

Beberapa temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) PT X telah benar-benar menerapkan sistem pengendalian internal, khususnya atas sistem penagihannya; implementasi dapat diwujudkan melalui pembuatan ringkasan jadwal penuaan, penerapan pembatasan data terhadap data yang terkait dengan piutang, dan pembuatan Prosedur Operasi Standar (SOP) terkait dengan aktivitas penagihannya; (2) Ada fluktuasi atau perubahan yang tidak konsisten pada rasio A/R pada periode tertentu sebagai salah satu indikator utama; itu menunjukkan bahwa implementasi tidak cukup efektif; (3) beberapa faktor yang menyebabkan beban piutang tak tertagih di PT X adalah ketidakmampuan PT.X untuk melakukan analisis kelayakan kredit dan kebijakan tenggang waktu yang mudah diberikan tanpa batasan serta penyewa yang gagal mengungkapkan perubahan nomor telepon atau alamat kepada PT X sehingga PT X mengalami kesulitan untuk menagih pembayaran dari mereka; dan (4) PT X tidak menulis tentang beban piutang tak tertagihnya dan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam PSAK (Standar Akuntansi Indonesia yang diadopsi dari IFRS) 55 yang mengharuskan untuk menghapus beban hutang tak tertagih. Namun, ada beberapa batasan pada penelitian ini seperti periode penelitian, indikator, dan faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan seperti keadaan ekonomi saat ini dan perkembangan teknologi.

**Kata Kunci:** Kontrol Internal, Hutang tak Tertagih, Rasio Piutang, Analisis Kelayakan Kredit

## 1. Pendahuluan

Menurut Purba (2015: 20), Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk usaha yang paling populer di Indonesia karena PT dapat dipergunakan untuk usaha kecil, menengah, dan besar (tergantung pada besarnya modal dasar perseroan) dan dipergunakan untuk seluruh klasifikasi usaha seperti jasa, kontraktor, pertambangan, telekomunikasi, dan lainnya.

Perseroan Terbatas juga didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan profitabilitas yang maksimal atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Profitabilitas berperan penting dalam menentukan

keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Apabila suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, tidak mampu mencapai aspek profitabilitas dalam kegiatan usahanya, maka kelangsungan usaha tersebut akan menghadapi ancaman serius.

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan melakukan kegiatan transaksi berupa penjualan barang atau jasa kepada pembeli. Transaksi jual-beli barang atau jasa yang diselenggarakan umumnya menggunakan dua cara pembayaran yang paling sering

digunakan, yakni secara *cash* atau tunai dan secara kredit.

Pembayaran tunai adalah metode pembayaran yang melibatkan uang tunai. Berbeda dengan sistem pembayaran kredit, metode pembayaran tunai hanya berlangsung sekali saja. Pembayaran yang dilakukan dengan sistem kredit tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif dari diterapkannya sistem tersebut adalah meningkatkan jumlah penjualan dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan jika pembeli mampu melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pembayaran yang menggunakan sistem ini adalah membuat perusahaan yang menerapkannya tidak dapat mendapatkan uang dari hasil penjualannya secara langsung atau kontan dan apabila piutang tersebut akhirnya tidak dapat ditagih maka akan mengakibatkan kerugian karena ketidakmampuan pembeli untuk melunasi hutangnya. Kerugian inilah

yang disebut sebagai *bad debt expense* atau beban piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih tentunya bersifat merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi jumlah laba yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, piutang tak tertagih harus diminimalisasi jumlahnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih adalah dengan melakukan pengendalian atas jenis piutang tersebut. Pengendalian atas piutang tak tertagih merupakan bagian dari pengendalian internal yang dilakukan perusahaan.

Sistem pengendalian internal dalam manajemen piutang perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisasi piutang tak tertagih sesuai prosedur dan mencegah tindakan *fraud* (kecurangan) atas jumlah piutang tersebut berupa tidak dicatatnya piutang yang terkumpul atau digelapkannya jumlah piutang yang diterima untuk kepentingan diri sendiri (dicatat namun diambil oleh

pihak yang melakukan kecurangan tersebut).

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pengendalian internal tersebut diterapkan oleh PT X, khususnya pada sistem penagihan piutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan mengetahui seberapa efektifkah penerapan sistem pengendalian internal atas sistem penagihan piutang tersebut terhadap upaya minimalisasi jumlah piutang tak tertagih PT X dari tahun 2014 hingga 2016.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Siklus Pendapatan

Romney dan Steinbart (2015: 340) mendefinisikan siklus pendapatan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang diasosiasikan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang dalam pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus pendapatan, dalam bentuknya yang paling sederhana, didefinisikan

sebagai proses pertukaran langsung (*direct exchange*) barang atau jasa dengan uang pada sebuah transaksi antara penjual dan pembeli (Hall, 2011).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam siklus pendapatan terdapat suatu proses transaksi yang melibatkan pihak penjual dan pembeli. Penjual dalam situasi ini akan memberikan jasa atau barang yang dimilikinya kepada pembeli dan pembeli akan membayar barang atau jasa tersebut dengan sejumlah uang yang nilainya sebesar harga yang ditetapkan oleh pihak penjual atas barang atau jasa yang dimaksud.

Romney dan Steinbart (2015: 340) menjabarkan empat aktivitas utama yang terdapat dalam siklus pendapatan, yakni memasukkan *order* penjualan, mengirimkan barang (*shipping*), *billing* atau menagih pelanggan, dan *cash collection* atau mengumpulkan sejumlah uang hasil dari penagihan tersebut.

wajib pajak dalam menilai pajak memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi individu dalam memberikan pandangan tentang berbagai hal didapat dari pengaruh yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal individu itu sendiri sebagaimana diterangkan dengan sangat relevan dan gamblang dalam teori atribusi. Teori yang pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider (1968) ini secara umum menerangkan bahwa jika beberapa individu melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang, maka sekumpulan orang tersebut akan berupaya mencari tahu apakah individu tersebut berperilaku tertentu atas sebab pengaruh eksternal atau internal (Robbins, 1996). Perilaku yang bermuara dari dalam individu (internal) diyakini sebagai tingkah laku yang berada dalam ranah kendali individu tersebut, adapun tingkah laku yang berasal dari faktor luar (eksternal) adalah perilaku yang dihasilkan oleh pengaruh luar dimana individu yang bersangkutan bertingkah

laku atas dasar keterpaksaan dikarenakan dorongan situasi. (Jatmiko, 2006).

Teori atribusi memiliki kaitan terhadap penelitian kali ini dimana faktor eksternal dan internal telah memberi pengaruh terhadap seseorang untuk menentukan akan patuh atau sebaliknya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Adapun faktor yang berasal dari dalam (internal) yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah persepsi atas kesadaran perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, sedangkan faktor eksternal yang digunakan adalah persepsi atas kualitas pelayanan fiskus dan persepsi atas kemajuan teknologi.

## **2.2 Piutang**

Kieso (2014: 299) mendefinisikan piutang sebagai klaim yang dimiliki atas pelanggan dan yang lainnya terkait uang, barang, maupun jasa. Jadi, piutang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berhak ditagih kepada pelanggan atas penjualan barang dan pelayanan jasa

yang diberikan.

Kieso (2014: 299) mengklasifikasikan piutang berdasarkan jangka waktu pengumpulannya. Apabila perusahaan tersebut diharapkan dapat mengumpulkan piutang dari pelanggan tersebut dalam waktu kurang dari setahun, maka jenis piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai *short-term (current) receivables* atau piutang jangka pendek. Sebaliknya jika piutang tersebut dikumpulkan dalam waktu lebih dari setahun maka piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai *long-term receivables* atau piutang jangka panjang.

### 2.3 Piutang Tak Tertagih

Donald Kieso *et.al.* (2007: 350), sebagaimana tertulis dalam skripsi karya Suwarno yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Piutang untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Tak Tertagih pada PT Olympindo Multifinance (OMF)”, mendefinisikan piutang tak tertagih

sebagai kerugian pendapatan, penurunan aktiva piutang usaha, dan penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Secara singkat, piutang tak tertagih disebabkan oleh ketidakmampuan pembeli untuk membayar hutang-hutangnya kepada si penjual sehingga penjual mengalami kerugian karena tidak mampu menagih si pembeli.

Ada dua metode yang sering digunakan dalam pencatatan piutang tak tertagih, yaitu: (Weygandt *et.al.*, 2013: 370)

#### 1. *Direct Write-Off Method*

Perusahaan mengakui kerugian atas piutang tak tertagih sebagai *Bad Debt Expense* di sisi debit dan menghapus sejumlah *Accounts Receivable* yang akan dihapus di sisi kredit. *Bad Debt Expense* dalam metode ini menunjukkan jumlah kerugian yang sebenarnya dari jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Perusahaan seringkali

mencatat *bad debt expense* dalam metode ini dalam periode atau jangka waktu yang berbeda dari periode pencatatan pendapatan (Weygandt *et.al.*, 2013: 371).

## 2. Allowance Method

Metode ini mengharuskan penggunaannya untuk mengestimasi atau memperkirakan berapa jumlah piutang yang tidak dapat ditagih di akhir periode. Kelebihan metode ini adalah dapat mengestimasi jumlah pendapatan dengan baik, yakni sesuai dengan jumlah yang sebenarnya (Kieso, 2014: 303). Kieso (2014: 305) menjelaskan ada dua basis utama yang digunakan untuk menentukan jumlah piutang tak tertagih dalam *allowance method*, yakni persentase dari penjualan dan persentase dari piutang.

## 2.4 Sistem Pengendalian Internal

*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* (2013: 3) mendefinisikan *internal control* sebagai “sebuah proses yang melibatkan jajaran direktur, manajemen, dan karyawan di suatu perusahaan yang didesain untuk menyajikan *reasonable assurance* terkait pencapaian dari tujuan perusahaan yang mencakup operasional perusahaan, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.” Berdasarkan definisi tersebut, pengendalian internal dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa segala aktivitas terkait bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut telah dijalankan sesuai prosedur (standar) dan peraturan yang berlaku, termasuk penyusunan laporan keuangannya.

Romney dan Steinbart (2015:190) menjelaskan beberapa fungsi penting dari sistem pengendalian internal. Fungsi pengendalian internal itu sendiri

mencakup pengendalian preventif, detektif, dan korektif.

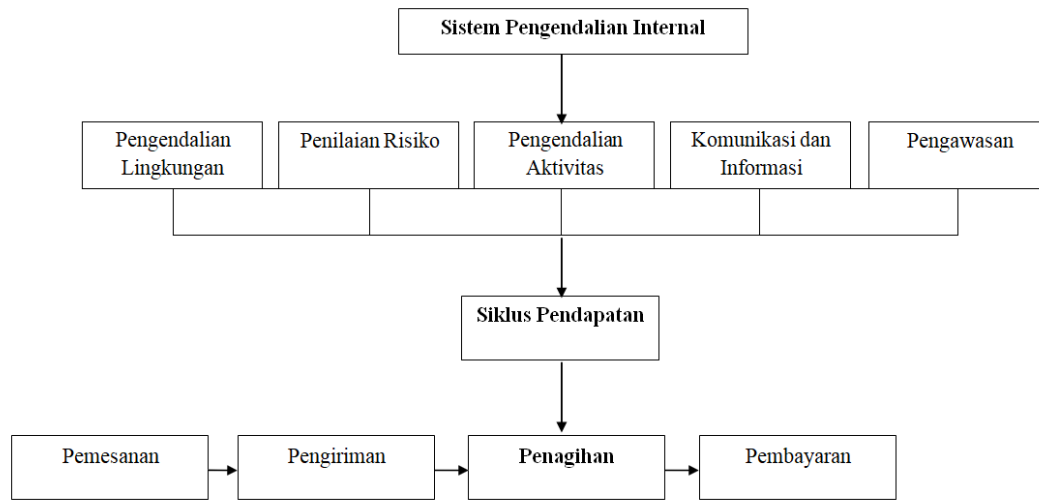
COSO, dalam publikasinya yang berjudul "COSO Framework" (2013:4-5), mengemukakan lima komponen utama dari sistem pengendalian internal, yaitu pengendalian lingkungan, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, serta *monitoring* atau pengawasan.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini secara umum membahas penerapan komponen-komponen sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan. Adapun fokus pembahasan dari skripsi ini adalah penerapan sistem pengendalian internal pada salah satu bagian dari siklus pendapatan itu sendiri, yakni penagihan dan dampaknya bagi piutang tak tertagih yang dihasilkan dari proses tersebut.

Secara umum kegiatan penjualan yang dilakukan sebagai bagian dari siklus pendapatan menghasilkan piutang bagi pihak pembeli. Pihak penjual wajib menagih piutang tersebut kepada pembeli dan ada dua kemungkinan tertagihnya piutang tersebut, yaitu berhasil tertagih sehingga menghasilkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan si penjual dan gagal tertagih sehingga menghasilkan piutang tak tertagih yang mengurangi keuntungan penjual. Peneliti memfokuskan kepada penerapan sistem pengendalian internal atas sistem penagihan piutang dan dampaknya pada piutang tak tertagih di PT X mengingat apabila jumlah piutang tersebut tidak dapat dikendalikan dengan baik maka akan mengurangi keuntungan yang dimiliki sehingga berdampak negatif bagi profitabilitas perusahaan itu sendiri.





Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan evaluatif sehingga penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2017 dan bertempat di PT X yang bertempat di Jakarta Utara.

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan sejumlah karyawan di PT X, khususnya manajer perusahaan

tersebut dan karyawan yang bertanggung jawab atas penagihan piutang pada pelanggan atau pemilik unit. Data sekunder berupa dokumentasi atau data tertulis yang berhubungan dengan penelitian dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi adalah suatu teknik untuk menilai validitas suatu data yang telah didapatkan melalui proses *cross-checking* (pengecekan silang) kepada sumber informasi

atau pemberi data tersebut (Fraenkel dan Wallen, 2009: 422). Jadi, teknik triangulasi adalah teknik untuk menilai keabsahan data yang didapatkan dengan melakukan konfirmasi kepada beberapa pemberi data atau informan yang berbeda mengenai keabsahan data tersebut.

## 4. Analisis dan Pembahasan

### 4.1 Deskripsi Data

Berikut ini adalah kondisi piutang angsuran jual dan sewa dari PT X periode 2014-2016 berdasarkan umur piutangnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2:

**Tabel 1**  
**Kondisi Piutang Jual Angsuran PT X Berdasarkan Umur Piutangnya (dalam Rupiah)**

Kategori Piutang	Periode		
	2014	2015	2016
Belum Jatuh Tempo	0	8.764.516.569	25.302.405.725
Sudah Jatuh Tempo	Periode		
Umur Piutang	2014	2015	2016
0-30 hari	0	41.626.000	208.912.000
31-60 hari	0	24.423.000	156.765.000
61-90 hari	0	14.591.000	47.419.000
> 90 hari	0	0	55.457.000
Total	0	8.845.156.569	25.770.958.725

Sumber: Data Perusahaan X (2014-2016)

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2014 jumlah piutang tak tertagih pada PT X dianggap tidak ada karena telah dihapuskan oleh PT X pada saat terjadinya pergantian kepemilikan dalam tubuh perusahaan tersebut.

Secara garis besar, dari data dalam tabel ini dapat disimpulkan bahwa jumlah piutang tak tertagih khusus untuk piutang angsuran dari *tenant* yang membeli unit di mal ABC dari PT X mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**Tabel 2**  
**Kondisi Piutang Angsuran Sewa PT X Berdasarkan Umur Piutangnya**

Kategori Piutang	Periode		
	2014	2015	2016
Belum Jatuh Tempo	0	136.340.471.993	123.824.074.170
Sudah Jatuh Tempo	Periode		
Umur Piutang	2014	2015	2016
0-30 hari	0	190.900.003	37.110.000
31-60 hari	0	173.625.458	20.000.000
61-90 hari	0	116.408.891	3.447.656
> 90 hari	0	460.305.960	128.184.969
Total	0	137.281.712.405	124.012.816.795

Sumber: Data Perusahaan X (2014-2016)

Berdasarkan data di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa jumlah piutang tak tertagih yang berasal dari angsuran sewa PT X mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini sangatlah berbeda dengan jumlah piutang tak tertagih yang berasal dari *tenant* yang

membeli unit di mal ABC dari PT X yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun untuk klasifikasi atau penggolongan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagihnya sesuai dengan kebijakan perusahaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Golongan Piutang Berdasarkan Umur Piutang dan Kemungkinan Tertagihnya**

No.	Umur Piutang (hari)	Golongan Piutang	Kemungkinan Tertagih (persen)
1.	0-30	Aman	75
2.	31-60	Cukup Aman	50
3.	61-90	Kurang Aman	25
4.	> 90 hari	Tidak Aman	0

Sumber: Data Perusahaan X (2014-2016)

Berdasarkan umur piutangnya, piutang tak tertagih dapat digolongkan menjadi piutang aman, cukup aman, kurang aman, dan tidak aman. Piutang berupa tunggakan pembelian atau penyewaan unit yang berumur 0-30 hari digolongkan ke dalam golongan piutang aman yang memiliki kemungkinan tertagih paling tinggi sebesar 75%. Sementara itu, piutang yang berumur 31-60 hari termasuk ke dalam golongan piutang yang cukup aman dengan kemungkinan tertagih sebesar 50%. Golongan piutang yang kurang aman didefinisikan sebagai golongan piutang yang terdiri atas piutang tak tertagih yang berumur 61-90 hari. Golongan piutang ini memiliki kemungkinan tertagih yang cukup kecil sebesar 25%. Terakhir, apabila piutang tersebut berumur lebih dari 90 hari maka dapat digolongkan ke dalam piutang yang bersifat tidak aman dengan kemungkinan tertagih sebesar 0%. Ini artinya bahwa golongan piutang ini merupakan

golongan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi. Sebagian besar piutang tak tertagih yang berasal dari golongan piutang tersebut berasal dari penjualan atau penyewaan yang dilakukan *tenant* pada PT X di saat PT X masih berada dalam kepemilikan manajemen yang lama.

#### **4.2 Pembahasan**

PT X adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, lebih tepatnya penjualan/ penyewaan unit (kios/ruko) yang tersedia di mal ABC. PT X bertugas untuk menagih sejumlah pembayaran kepada *tenant* yang menyewa atau membeli unit yang tersedia di mal ABC setiap bulannya. Keberadaan PT X secara langsung menjadi bagian dari siklus pendapatan mal ABC itu sendiri, yakni penagihan. Meskipun demikian, PT X hanya memiliki wewenang yang terbatas, yaitu menagih pembayaran tagihan jual atau sewa kepada *tenant* di mal ABC sehingga PT X tidak berwenang untuk menentukan

*tenant* manakah yang pantas atau layak diberikan izin untuk membuka usahanya di mal ABC melalui analisis kelayakan kredit atau *creditworthiness*.

PT X telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya sehari-hari meskipun sebagian besar penerapannya masih dilakukan pada jenjang otoritas saja. Sebagai contoh, pembuatan *Standard Operating Procedure* yang isinya wajib dipahami dan diterapkan oleh para karyawan yang bekerja di PT X, kewajiban bagi beberapa karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak luar sesuai dengan kompetensi atau bidang pekerjaannya, pembuatan struktur organisasi yang menjelaskan alur pertanggungjawaban kerja masing-masing personel atau karyawan, serta penerapan sistem *password* atau kata sandi untuk mengakses data tertentu sehingga hanya orang-orang tertentu saja, terutama

mereka yang memang memiliki wewenang atau hak mengakses data tersebut yang dapat mengakses atau bahkan mengubah isinya jika diperlukan.

Beberapa contoh sistem pengendalian internal yang diterapkan pada sistem penagihan di PT X adalah pembuatan SOP terkait penagihan yang isinya harus dipahami serta diterapkan oleh karyawan yang bekerja di bidang atau subdivisi penagihan, pembatasan akses pada data terkait piutang jual maupun sewa dengan menerapkan sistem *password*, kewajiban untuk menyerahkan lembaran tagihan yang dibuat kepada manajer perusahaan untuk dicek atau diverifikasi sebelum diberikan kepada *tenant* yang bersangkutan, serta pembuatan laporan *aging schedule* atau daftar umur piutang.

Berbicara mengenai jumlah piutang tak tertagih di PT X, secara garis besar, kemampuan PT X menagih piutang kepada para

*tenant* di mal ABC pada periode 2014-2016 secara garis besar dapat dikatakan menurun. Hal ini dikarenakan kebijakan *grace period* yang diberikan tanpa batas maksimum, kelalaian *tenant* untuk memberitahukan perubahan alamat atau nomor telepon sehingga sulit untuk dihubungi pihak PT X, dan tidak diberikannya wewenang PT X untuk melakukan analisis kelayakan kredit karena keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh PT X itu sendiri, yakni sebatas untuk melakukan penagihan kepada *tenant* saja.

Selain itu, PT X juga hingga saat ini belum mengakui adanya AFDA (*Allowance for Doubtful Accounts*) pada laporan keuangannya. Hal ini tidak sesuai dengan isi dari PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang mengatur bahwa kerugian penurunan nilai pada piutang harus diakui jika terdapat bukti yang cukup objektif tentang penurunan nilai tersebut.

PSAK 55 juga mengatur bahwa nilai dari piutang tak tertagih harus dihapuskan seluruhnya kecuali jika piutang tersebut ada jaminannya. Apabila piutang tak tertagih tersebut memiliki jaminannya sendiri, maka nilai piutang tak tertagih tersebut harus diakui sebesar nilai piutang tak tertagih yang tidak ada jaminannya. Oleh karena itu, berdasarkan standar yang ada, yakni PSAK 55, maka PT X perlu melakukan *write off* atau penghapusan atas jumlah piutang tak tertagihnya setelah periode pergantian kepemilikan di tahun 2012. *Write off* atau penghapusan tersebut hanya dilakukan jika *tenant* tersebut memang secara objektif dan dengan bukti yang cukup dianggap tidak sanggup membayar hutangnya kepada PT X.

PT X juga tidak mempunyai SOP khusus untuk manajemen piutang tak tertagih. Manajemen jenis piutang tersebut mencakup cara menetapkan standar kekayaan yang jelas bagi PT X untuk dapat

menentukan apakah *tenant* tersebut layak untuk menyewa atau membeli unit yang telah dibeli melalui analisis rekening koran yang dimiliki hingga cara untuk mencadangkan kerugian yang ditimbulkan dari piutang tak tertagih itu sendiri. Standar kekayaan tersebut akan dibandingkan dengan laporan *aging schedule* piutang tak tertagih untuk mengevaluasi kemampuan *tenant* dalam membayar angsuran per bulannya.

## **5. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisa, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT X telah menerapkan sistem pengendalian internal terhadap sistem piutangnya secara khusus berdasarkan lima komponen utama sistem pengendalian internal dari *COSO Framework* dalam bentuk pembatasan akses

dalam bentuk *password* atau kata sandi terhadap data piutang yang terdapat dalam aplikasi tersendiri milik PT X, pembuatan SOP tentang cara membuat tagihan dan bagaimana tagihan tersebut ditagih setiap bulannya, dan pembuatan laporan *aging schedule* piutang. Meskipun demikian, penerapan tersebut memiliki sedikit kelemahan; kelemahan tersebut terdapat pada tidak dilakukannya analisis tersendiri terhadap *aging schedule* untuk menentukan cadangan kerugian piutang dan keterbatasan wewenang PT X untuk melakukan analisis kelayakan kredit.

2. Penerapan sistem pengendalian internal atas sistem penagihan piutang yang dilakukan PT X belum cukup efektif dalam upaya untuk meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih yang dimiliki perusahaan

tersebut pada periode 2014 hingga 2016.

3. Ketidakefektifan penerapan sistem pengendalian internal tersebut disebabkan karena:
  - a. kebijakan *grace period* yang terlalu mudah diberikan tanpa batas pemberian.
  - b. tidak dilakukannya analisis kelayakan kredit.
  - c. dan tidak adanya SOP khusus untuk manajemen piutang tak tertagih yang mencakup cara menetapkan standar kekayaan tersendiri dengan menggunakan data rekening koran sebagai acuannya untuk melakukan analisis kelayakan kredit dan evaluasi kemampuan membayar *tenant* hingga cara melakukan *write-off* atau pencadangan kerugian

piutang.

## 5.2 Saran

PT X sebaiknya melakukan analisis kelayakan kredit dengan cara menganalisis data rekening koran calon *tenant* sekaligus menggunakan data tersebut sebagai acuan atau standar kekayaan tersendiri untuk menentukan layak atau tidaknya *tenant* tersebut menyewa atau membeli unit yang tersedia di mal ABC. PT X sebaiknya juga perlu menambahkan SOP tentang manajemen piutang tak tertagih yang isinya mengatur tentang bagaimana analisis tersebut dilakukan.

Berdasarkan aturan yang terdapat dalam PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, PT X sebaiknya melakukan estimasi pencadangan kerugian piutang yang dapat dilakukan seluruhnya kecuali jika ada jaminan dari *tenant* yang bersangkutan.

## 5.3 Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian lanjutan, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:



- a. Mempertimbangkan indikator lain untuk melakukan analisis serupa seperti analisis terhadap nilai DP atau *Down Payment* (pembayaran di muka) dan rasio penagihan.
- b. Mempertimbangkan untuk menambah periode penelitian jika memungkinkan untuk dapat memperkuat hasil analisis data dari penelitian yang dilakukan.
- c. Mempertimbangkan faktor eksternal lainnya seperti kondisi perekonomian nasional (makroekonomi), bencana alam, dan perkembangan teknologi seperti *e-commerce*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustanto, H.L. (2012). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pendapatan Guna Meningkatkan Pengendalian Internal Perusahaan yang Menjual Komponen Sepeda Motor. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Widya Mandala*, 1(1), 85.
- Ahiabor, G. & Mensah, C.C.Y. (2013). Effectiveness of Internal Control on the Finances of Churches in Greater Accra, Ghana. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(13), 2.
- Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach: Fifteenth Edition*. New Jersey: Pearson.
- COSO. (2013). *Internal Control: Integrated Framework: Executive Summary*. USA: COSO.
- Duchac, J.E., Reeve, J.M., & Warren C.S. (2007). *Financial Accounting: An Integrated Statements Approach*. USA: Thomson-South Western.
- Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2009). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill.
- Frazer, L. (2012). The Effect of Internal Control on the Operating Activities of Small Restaurants. *Journal*

- of Business and Economics Research*, 10(6), 363.
- Gelinas, U.J. & Dull, R.B. (2008). *Accounting Information System: Seventh Edition*. Canada: Thompson South-Western.
- Hall, J.A. (2011). *Accounting Information Systems: Seventh Edition*. USA: Cengage Learning.
- Johnson, R.M., Kell, W.G. & Boynton, W.C. (2001). *Modern Auditing: Seventh Edition*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Kieso, D.E., Weygandt J.J., & Warfield, T.D. (2013). *Financial Accounting IFRS Edition (Second Edition)*. USA: Wiley.
- Kieso, D.E., Weygandt J.J., & Warfield, T.D. (2014). *Intermediate Accounting: Second Edition*. USA: Wiley.
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Kusumadewi, A.W. & Adam H. (2014). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan (Studi Kasus pada RSUD dr. "X"). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 3.
- Laudon, K.C. & Laudon, J.P. (2011). *Essentials of MIS, 9<sup>th</sup> Edition*. New Jersey: Pearson.
- Mitayani, D. (2016). *Analisis Piutang Tak Tertagih terhadap Tingkat Perputaran Piutang pada CV. Berlian Abadi di Surabaya*. Surabaya: Universitas Narotama.
- Purba, O. (2015). *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Riwayati, S. (2013). Analisis Pengendalian Piutang terhadap Risiko Piutang Tak Tertagih pada PT. XYZ, 3-5.
- Romney, M.B. & Steinbart, P.J. (2015). *Accounting Information Systems: Thirteenth Edition*. New Jersey: Pearson.
- Scarborough, N.M., Zimmerer T.W., & Wilson, D. (2009). *Effective Small Business Management, 9<sup>th</sup> Edition*. New Jersey: Pearson.
- Selviana. (2013). *Analisis Pengendalian Intern atas Piutang Usaha pada PD Subur Jaya Palembang*. Palembang: Universitas Tridinanti.

Soeharto, C., Kowi, W.B. & Muldani. (2010). *Analisis dan Perancangan Knowledge Management System untuk Pengelolaan Property pada PT Mandiri Dipta Cipta*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.

Sollish, F. & Semanik, J. (2007). *The Procurement and Supply Manager's Desk*

*Reference*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Suwarno. (2009). *Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Piutang untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Tak Tertagih pada PT. Olympindo Multifinance (PT. OMF)*. Jakarta: Universitas Mercubuana.